



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RANCANGAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BELITUNG**

Tanjungpandan, Agustus 2025

BAB I

PENDAHULUAN

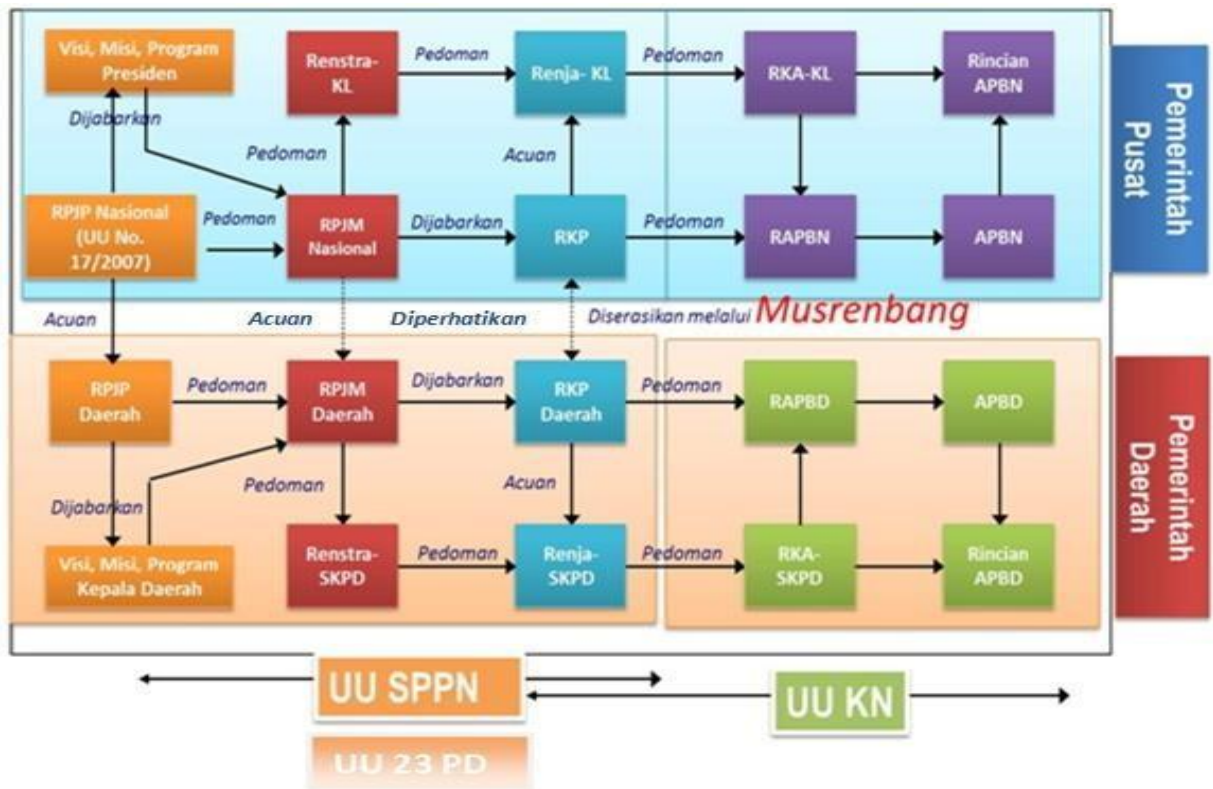
1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan peraturan tersebut Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, termasuk pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Berdasarkan persatuan diatas dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7715);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

-
- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11);
 21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung tahun 2025-2030.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk

1. Menyelaraskan antara Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD tahun 2025;
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya melaksanakan Pelayanan;
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Sub kegiatan;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Perangkat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2025
- 2.2. Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2025

Perubahan Rencana Akhir Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

Pencapaian pada Tahun 2025 merupakan Pencapaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II berikut pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel dibawah ini:

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

TRIWULAN II

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
						I		II		III		IV							
						6		7		8		9						10	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	13	14	
		2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.805.466.699		1.180.550.246		1.374.371.597					2.554.921.543	28,47	44,01		
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.643.278.739		1.171.090.197		1.367.809.097					2.538.809.294	34,35	44,99	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	0		0		0					0		0			
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (%)	75,44		0		0					0		0			
				Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	0		0		0					0		0			
				Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	0		0		0					0		0			
				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah (%)	100											0			
				Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	0		0		0					0		0			
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.096.800		-		-					-	8,33	0		
			Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		1					1		50			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0					0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0					0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0					0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0					0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3		0		0					0		0			
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			349.800		-		-					-	50	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		1					1		50			
		2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			349.800		-		-					-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0					0		0			
		2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			349.800		-		-					-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0					0		0			
		2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			349.800		-		-					-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
						I		II		III		IV			11					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	%
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0							0		0				
		2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			349.800		-		-						-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0							0		0				
		2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			349.800		-		-						-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	0	0							0		0				
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.180.192.494		1.095.474.999		1.277.767.079						2.376.242.078	30,95	45,87		
			Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		26		26					26			92,86			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2		0		0					0		0				
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0					0		0				
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.179.492.894		1.095.474.999		1.277.767.079						2.376.242.078	92,86	45,88		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		26		26					26			92,86			
		2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			349.800		-		-						-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2		0		0					0		0				
		2.18.01.2.02.0006	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran			349.800		-		-						-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0					0		0				
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			16.632.000		-		-						-	0	0		
			Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0					0		0				
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		0					0		0				
		2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-						-	0	0		
			Tersedianya Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0					0		0				
		2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			16.632.000		-		-						-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		0					0		0				
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			131.023.205		24.581.403		26.078.974						50.660.377	96,43	38,67		
			Jenis penyediaan keperluan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diadakan (Paket)	1		0		1					1		100				
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan (Paket)	2		0		2					2		100				
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diadakan (Paket)	1		0		1					1		100				
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diadakan (Paket)	2		3		1					1		50				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		2						2		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		2		2						2		200			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		3						3		25			
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.544.451	0		1	1.575.000					1	1.575.000	100	34,86		
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	18.993.577	0		2	4.644.000					2	4.644.000	100	24,45		
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	6.768.809	0		1	1.407.000					1	1.407.000	100	20,79		
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	51.576.132	3	15.625.600	1	8.296.500					1	23.922.100	50	46,38		
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	7.540.236	0		2	3.743.000					2	3.743.000	100	47,74		
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2.800.000	2	810.000	2	1.130.000					2	1.940.000	200	69,29		
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	38.500.000	3	8.145.853	3	5.263.474					3	13.429.277	25	34,86		
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0						0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	76		0		0						0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	26		0		0						0		0			
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0						0		0			
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	76		0		0						0		0			
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	26		0		0						0		0			
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	250.194.600	3	45.183.095	3	52.264.994					3	97.448.089	25	38,95		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
						I		II		III		IV									
						1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3							3		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3							3		25			
		2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.100.000		332.000		66.000						398.000	25	18,95		
			Tertakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		3		3							3		25			
		2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.560.000		28.261.995		27.315.344						55.577.339	25	37,41		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3							3		25			
		2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				99.534.600		16.589.100		24.883.650						41.472.750	25	41,67		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3							3		25			
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63.137.640		2.760.700		11.698.050						14.456.750	17,24	22,9		
			Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18		6		8							8		44,44			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		0		0							0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	53		10		13							13		24,53			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0							0		0			
		2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.753.000		2.360.700		5.698.050						8.056.750	44,44	26,2		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18		6		8							8		44,44			
		2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.111.740		-		-						-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		0		0							0		0			
		2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.633.900		-		5.500.000						5.500.000	24,53	28,01		
			Tertakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	53		10		13							13		24,53			
		2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.639.000		400.000		500.000						900.000	0	54,91		
			Tertakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0							0		0			
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				43.681.944		1.356.000		4.535.000						5.891.000	16,67	13,49	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	
			Meningkatnya iklim penanaman modal	Jumlah investor yang menanamkan modal (Investor)	90													0			
				Realisasi total terhadap target investasi (%)	0		0		0							0		0			
				Jumlah investor yang menanamkan modal (Investor)	90													0			
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif DiBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				43.681.944		1.356.000		4.535.000						5.891.000	25	13,49		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
					I		II		III		IV							
					7	8	9	10	11	12=11/6 x 100%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/6 x 100%	13	14					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Investor yang menanamkan modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1		0		0				0		0			
				Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2		0		1				1		50			
	2.18.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			33.060.919		1.356.000		4.163.000				5.519.000	0	16,69		
			Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1		0		0				0		0			
	2.18.02.2.01.0003		Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			10.621.025		-		372.000				372.000	50	3,5		
			Tertelaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2		0		1				1		50			
	2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			-		-		-				-	0	0		
			Dokumen Peta Potensi Investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0				0		0			
	2.18.02.2.02.0004		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			-		-		-				-	0	0		
			Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0				0		0			
	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			60.003.060		-		-				-	0	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	
			Meningkatnya promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)	0		0		0				0		0			
				Persentase promosi penanaman modal (%)	100										0			
	2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			60.003.060		-		-				-	0	0		
			Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0				0		0			
				Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1		0		0				0		0			
	2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			60.003.060		-		-				-	0	0		
			Tertelaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0				0		0			
	2.18.03.2.01.0003		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		-				-	0	0		
			Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1		0		0				0		0			
	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			39.261.860		7.402.049		1.262.500				8.664.549	20	22,07	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	
			Meningkatnya pertiznin berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)	0		0		0				0		0			
				Realisasi Penyelesaian Pertiznin dan Non Pertiznin (%)	81										0			
	2.18.04.2.01		Pelayanan Pertiznin dan Non Pertiznin Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			39.261.860		7.402.049		1.262.500				8.664.549	20	22,07		
			Meningkatnya pertiznin berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Pertiznin Berusaha melalui Sistem Pertiznin Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	450		110		90				90		20			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
						I		II		III		IV			11	12=11/6 x 100%				
						7		8		9		10								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			39.261.800		7.402.049		1.262.500						8.664.549	20	22,07		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	450		110		90						90		20			
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			19.243.087		792.000		765.000						1.557.000	7,14	8,09	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Kepatuhan Investor/ Pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal (%)	100		0		0						0		0			
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Merjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			19.243.087		792.000		765.000						1.557.000	7,14	8,09		
			Penusahan yang dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang merjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam menasalisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	70		15		15						15		21,43			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikut Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	5		0		0						0		0			
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Dllakukan Inspekti Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	5		0		0						0		0			
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam menasalisasikan Kegiatan Usahanya			19.243.087		792.000		765.000						1.557.000	21,43	8,09		
			Tertakannya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam menasalisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam menasalisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	70		15		15						15		21,43			
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			-		-		-						-	0	0		
			Tertakannya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikut Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	5		0		0						0		0			
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			-		-		-						-	0	0		
			Tertakannya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Inspekti Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Dllakukan Inspekti Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	5		0		0						0		0			
		3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			699.629.263		34.200.000		58.591.880						92.791.880	0	13,26		
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			699.629.263		34.200.000		58.591.880						92.791.880	0	13,26	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	
			Meningkatnya hilirisasi sumber daya alam	Persentase realisasi investasi sektor industri (hilirisasi) (%)	0		0		0						0		0			
				Pertumbuhan Jumlah IKM (IKM)	208												0			
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			699.629.263		34.200.000		58.591.880						92.791.880	0	13,26		
			Tersusunnya Laporan Industri Kecil menengah yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		0						0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1		0		0						0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		0		0						0		0			
		3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			178.650.000		-		6.656.880						6.656.880	0	3,73		
			Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		0						0		0			
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			410.755.093		34.200.000		51.300.000						85.500.000	0	20,82		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1		0		0						0		0			
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			110.194.170		-		635.000						635.000	0	0,58		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		0		0						0		0			
				JUMLAH		6.505.097.953		1.214.758.246		1.432.963.477						2.647.713.723				
				Rata-rata capaian kinerja (%)													26,33	40,7		
				Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya :																				

2.2. Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung di sesuaikan dengan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Belitung Tahun berjalan. Proses yang dilakukan yaitu menyusun rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan disamping tetap memperhatikan program dan kegiatan yang anggarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Awal Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100% 75,44% 100% 100%	7.515.294.130		
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan		9 Dokumen 100%	3.600.000		
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Tanjungpandan	2 Dokumen	600.000	APBD Kab	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tanjungpandan	1 Dokumen	600.000	APBD Kab	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tanjungpandan	1 Dokumen	600.000	APBD Kab	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tanjungpandan	1 Dokumen	600.000	APBD Kab	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tanjungpandan	1 Dokumen	600.000	APBD Kab	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjungpandan	3 Laporan	600.000	APBD Kab	
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya Dokumen Keuangan Sesuai Peraturan		3 Dokumen 100%	5.001.200.000		
Sub Kegiatan	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjungpandan	28 Orang/bulan	5.000.000.000	APBD Kab	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Awal Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanjungpandan	1 Laporan	600.000	APBD Kab	
	3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tanjungpandan	2 Dokumen	600.000	APBD Kab	
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		24 Orang 75,44%	310.750.000		
Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tanjungpandan	1 Paket	60.750.000	APBD Kab	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tanjungpandan	24 Orang	250.000.000	APBD Kab	
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah		100% 100%	508.000.000		
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tanjungpandan	1 Paket	30.000.000	APBD Kab	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tanjungpandan	2 Paket	75.000.000	APBD Kab	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tanjungpandan	1 Paket	21.000.000	APBD Kab	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tanjungpandan	2 Paket	94.000.000	APBD Kab	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tanjungpandan	1 Paket	32.000.000	APBD Kab	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tanjungpandan	1 Dokumen	6.000.000	APBD Kab	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	12 Laporan	250.000.000	APBD Kab	
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jenis Barang Milik Daerah Hasil : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		51 Jenis 100%	1.092.544.130		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Awal Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tanjungpandan	2 Jenis	450.000.000	APBD Kab	
	Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tanjungpandan	17 Jenis	326.694.130	APBD Kab	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tanjungpandan	13 Jenis	315.850.000	APBD Kab	
Kegiatan	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Keluaran : Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		100%	389.200.000		
		: Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah		100%			
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjungpandan	12 Laporan	4.000.000	APBD Kab	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tanjungpandan	12 Laporan	235.200.000	APBD Kab	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tanjungpandan	12 Laporan	150.000.000	APBD Kab	
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		2 Jenis	210.000.000		
		: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%			
Sub Kegiatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tanjungpandan	2 Jenis	100.000.000	APBD Kab	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tanjungpandan	1 Jenis	30.000.000	APBD Kab	
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tanjungpandan	53 Unit	40.000.000	APBD Kab	
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tanjungpandan	1 Jenis	40.000.000	APBD Kab	
Program	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor yang menanamkan modal		50 Investor	405.000.000		
Kegiatan	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitas kemudahan/insentif investasi		-	175.000.000		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Awal Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Hasil : Jumlah investor yang menanamkan modal					
Sub Kegiatan	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tanjungpandan	1 Dokumen	85.000.000	APBD Kab	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah		2 Kegiatan Usaha	90.000.000		
Kegiatan	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Keluaran : Dokumen Peta Potensi Investasi		1 Dokumen	230.000.000		
		Hasil : Persentase ketersediaan dokumen peta potensi investasi		40%			
Sub Kegiatan	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/ Kota	Keluaran : Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tanjungpandan	1 Dokumen	230.000.000	APBD Kab	
Program	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan promosi penanaman modal		100%	500.000.000		
Kegiatan	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah,kabupaten /kota	Keluaran : Promosi Penanaman Modal		3 Even	500.000.000		
		Hasil : Peningkatan promosi penanaman modal		100%			
Sub Kegiatan	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	150.000.000	APBD Kab	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Tanjungpandan dan Luar Daerah	3 Dokumen	350.000.000	APBD Kab	
Program	Program Pelayanan Penanaman Modal	Realisasi Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan		80%	200.000.000		
Kegiatan	Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanman modal yan menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota		100%	200.000.000		
		Hasil : Persentase Realisasi Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan		80%			
Sub Kegiatan	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tanjungpandan, Sijuk	450 Pelaku Usaha	200.000.000	APBD Kab	
Program	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kepatuhan Investor/ Pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal		100%	52.000.000		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Awal Tahun 2025				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Kegiatan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	52.000.000			
		Hasil : Kepatuhan Investor terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal		100%				
Sub Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong	70 Kegiatan Usaha	50.000.000	APBD Kab		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		5 Pelaku Usaha	1.000.000	DAK		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		5 Kegiatan Usaha	1.000.000	DAK		
Program	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM		40 IKM	710.000.000			
Kegiatan	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah IKM yang di bina		208 IKM	710.000.000			
		Hasil : Persentase industri Kecil menengah yang mendapatkan pembinaan		9%				
Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Keluaran Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1 Dokumen	180.000.000			
Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Tanjungpandan Sijuk dan luar daerah	1 Dokumen	470.000.000	APBD Kab		
Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong dan Selat Nasik	1 Dokumen	60.000.000	APBD Kab		
TOTAL PAGU RANWAL 2025					9.382.294.130			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dinas yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung di tingkat Provinsi, dalam Renstra tahun 2024 – 2026 telah menetapkan visinya yaitu :

“Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi daerah dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Penanaman Modal	Meningkatkan penyelenggaraan penanaman modal	Realisasi Investasi Tahun Berkenaan (Juta rupiah) Rumusan : Jumlah Realisasi Invstasi Tahun Berkenaan	1.014.243,10	1.050.000	1.200.000	1.400.000
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Rumusan : Nilai IKM tahun Berkenaan	3,70	3,72	3,74	3,76
2	Meningkatnya Pengelolaan Industri Kecil Menengah		Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB Rumusan : Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB (dikeluarkan BPS Kabupaten)	13,27%	13,30%	13,32%	13,35%
		Meningkatkan kualitas Industri Kecil, Menengah	Jumlah Produk IKM yang tersertifikasi Rumusan : Jumlah Produk IKM tersertifikasai (serifikat halal, sertifikat HKI, dokumen uji nutrisi, dll)	N/A	35 Produk	40 Produk	45 Produk

3.2. Program, kegiatan dan Sub kegiatan

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan. Adapun program, kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. Sifat sub kegiatan dari kegiatan dan program ini merupakan sub kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Rencana sub kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
Sub kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan dokumen perencanaan, indikator sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah, Rencana Kerja SKPD berupa Ranwal dan Ranhir Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
Sub kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan dokumen penganggaran, Indikator Sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
Sub kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan dokumen penganggaran, indikator sub kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
Sub kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan dokumen penganggaran, indikator sub kegiatan ini adalah dokumen DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
Sub kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan dokumen penganggaran, indikator sub kegiatan ini adalah dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan dokumen evaluasi

kinerja, indikator sub kegiatan ini adalah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

Indikator dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

Indikator dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;

Indikator dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

Indikator dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas atau pakaian khusus hari-hari tertentu untuk pegawai.

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia maka diperlukan pelatihan-pelatihan dan pendidikan formal dibidang pengelolaan keuangan daerah. Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya SDM yang mampu dan berkompeten dibidang pengelolaan keuangan daerah.

4. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah;

a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

Sub kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Untuk pelaksanaan suatu administasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran, oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan sub kegiatan ini. Indikator dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

Indikator dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minum kantor

-
- dan bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional.
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Indikator hasil dari Sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dokumen kebutuhan administrasi perkantoran.
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi perkembangan dalam pelaksanaan SKPD dan merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program sub kegiatan.
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
Bentuk Sub kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD. Indikator Sub kegiatan ini adalah tersedianya biaya perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah;
- a. Pengadaan Mebel ;
Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor untuk mendukung operasional.
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk mendukung operasional.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah;
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan sub kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi SKPD yang berbentuk arsip dinamis dan statis. Indikator dari sub kegiatan ini adalah tersedianya belanja jasa surat menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
Sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan pihak pemberi jasa. Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
Indikator dari sub kegiatan ini adalah tersedianya kesejahteraan bagi pegawai non PNS.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

Indikator hasil dari Sub kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD.

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

Indikator dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

- c. Pemeliharaan Mebel;

Indikator dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Mebel yang Dipelihara

- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Indikator dari Sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya sehingga selalu siap untuk dipergunakan untuk operasional kantor;

- e. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Indikator hasil dari Sub kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran.

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Indikator kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah Jumlah Investor yang diberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan adalah Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitas kemudahan/insentif investasi.

C. Program Promosi Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Promosi Penanaman Modal adalah Peningkatan Promosi Penanaman Modal dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten/kota. Output kegiatan adalah Peningkatan Promosi Penanaman Modal.

D. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Indikator kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal adalah Realisasi Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan. Program Pelayanan Penanaman Modal di dukung kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yan menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan adalah Persentase Realisasi Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Kepatuhan Investor/ Pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan adalah Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

F. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri adalah Pertumbuhan Jumlah IKM. Program dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Output kegiatan adalah Persentase industri Kecil menengah yang mendapatkan pembinaan.

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	20	
						Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian				7.205.515.377,00	6.816.699.112,00	6.505.097.953,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.518.802.624,00	6.217.719.442,00	5.805.468.690,00				
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6.518.802.624,00	6.217.719.442,00	5.805.468.690,00				
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 75,44 % %	100 75,44 % %	6.084.136.364,00	5.899.276.543,00	5.643.278.739,00				
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	3.002.400,00	3.002.400,00	3.002.400,00			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	500.400,00	500.400,00	349.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.400,00	500.400,00	349.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.400,00	500.400,00	349.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.400,00	500.400,00	349.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.400,00	500.400,00	349.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	500.400,00	500.400,00	349.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	5.167.976.679,00	5.180.493.694,00	5.180.493.694,00			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	5.166.975.879,00	5.179.492.894,00	5.179.492.894,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	500.400,00	500.400,00	349.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	500.400,00	500.400,00	349.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24 Orang	24 Orang	69.430.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	14.430.000,00	0,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	2 Orang	55.000.000,00	31.200.000,00	16.632.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	418.789.025,00	316.127.869,00	316.127.869,00			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.018.743,00	8.496.717,00	4.544.451,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	64.103.652,00	53.541.142,00	18.993.577,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.027.412,00	19.449.792,00	6.768.809,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	94.607.064,00	94.607.064,00	51.576.132,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.154,00	16.001.154,00	7.840.236,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.032.000,00	4.032.000,00	2.800.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	120.000.000,00	38.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	12 Laporan	12 Laporan	257.334.600,00	247.334.600,00	247.334.600,00			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.100.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	154.800.000,00	144.800.000,00	148.560.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	99.534.600,00	99.534.600,00	99.534.600,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	5 Jenis	5 Jenis	167.603.660,00	121.117.980,00	121.117.980,00			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	15 Unit	72.019.680,00	55.271.000,00	30.753.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	20.473.480,00	20.473.480,00	11.111.740,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	53 Unit	40.367.500,00	40.367.500,00	19.633.900,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	34.743.000,00	5.006.000,00	1.639.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang menanamkan modal	90 Investor	90 Investor	115.699.637,00	65.666.950,00	43.681.944,00			
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitas kemudahan/insentif investasi	60 Investor	60 Investor	61.964.037,00	65.666.950,00	65.666.950,00			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	47.009.747,00	52.112.660,00	33.060.919,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	14.954.290,00	13.554.290,00	10.621.025,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitas kemudahan/insentif investasi	60 Investor	60 Investor	53.735.600,00	0,00	0,00			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	53.735.600,00	0,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal	100 %	100 %	137.256.843,00	131.374.577,00	60.003.060,00			
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Penanaman Modal	3 Even	1 Even	137.256.843,00	131.374.577,00	131.374.577,00			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	137.256.843,00	131.374.577,00	60.003.060,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Realisasi Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	81 %	81 %	118.846.209,00	78.901.165,00	39.261.860,00				
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	118.846.209,00	78.901.165,00	78.901.165,00			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik										
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	450 Pelaku Usaha	450 Pelaku Usaha	118.846.209,00	78.901.165,00	39.261.860,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kepatuhan Investor/ Pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal	100 %	100 %	62.863.571,00	42.500.207,00	19.243.087,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	62.863.571,00	42.500.207,00	42.500.207,00			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	70 Kegiatan Usaha.	36 Kegiatan Usaha.	48.500.207,00	42.500.207,00	19.243.087,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	13.363.364,00	0,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	5 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			686.712.753,00	598.979.670,00	699.629.263,00					
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			686.712.753,00	598.979.670,00	699.629.263,00					
6	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah IKM	208 IKM	100 IKM	686.712.753,00	598.979.670,00	699.629.263,00				
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang di bina	208 IKM	100 IKM	686.712.753,00	598.979.670,00	598.979.670,00			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	185.000.000,00	181.856.000,00	178.680.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	385.489.183,00	300.900.100,00	410.755.093,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	116.223.570,00	116.223.570,00	110.194.170,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	J U M L A H									7.205.515.377,00	6.816.699.112,00	6.505.097.953,00			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta mempedomani Rancangan Rencana Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung telah disusun sebagaimana disajikan pada lampiran Perubahan Rencana Kerja ini.

Perubahan Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan tersebut telah mempedomani dan telah diselaraskan dengan dokumen RKPD Kabupaten Belitung tahun 2025. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan lokasi dan kelompok sasaran.

BAB V

PENUTUP

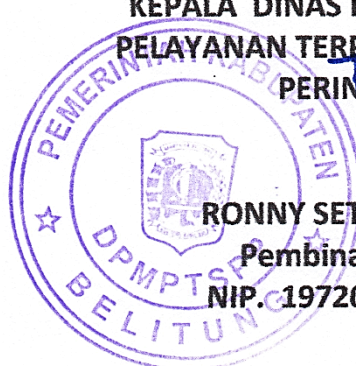
Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan RKPD Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

Dalam melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh pegawai karena akan menentukan keberhasilan program dan sub kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan cerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kebijakan daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Tanjungpandan, Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERINDUSTRIAN,**



RONNY SETIAWAN, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197201232000031003